

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Dua kabupaten Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Nunukan dan Malinau. Dua wilayah tersebut mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam tingkat keamanan. Oleh karena itu perlu adanya Peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan di perbatasan terutama permasalahan TKI ilegal dan ancaman keamanan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang rentan menjadi TKI ilegal.

Memandang hal tersebut, maka skripsi ini mencoba untuk menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan *Human Security* dalam Mengatasi TKI Ilegal di Perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia? Pertanyaan tersebut dijawab dengan fokus kepada dua aspek dari *Human Security*, yang pertama adalah *Personal Security*. Melalui kerjasama Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dan yang kedua adalah penerapan *Ekonomi Security* dan kebijakan pemerintah yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi permasalahan TKI Ilegal.

Dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia merupakan peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan

penampungan bagi TKI yang dideportasikan dari Malaysia. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi cukup tinggi adalah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Malaysia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi *Sosek Malindo*.

Dalam hal ini peran pemerintahan daerah Kalimantan Utara (Kaltara) sangat penting untuk bisa mewujudkan dan memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan, sejumlah usaha yang harus dilakukan pemerintah Kaltara agar tetap aman dan damai dengan menerapkan *Human Security* ini pemerintah harus mampu melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan manusia bagi TKI ilegal. Khususnya pada dua aspek yaitu *Economy Security* dan *Personal Security*.

Dari sisi *Economic Security*, pemerintah Kaltara masih perlu memperbaiki strategi untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas sehingga tidak ada lagi ancaman baik dari Pemerintah sendiri ataupun bagi masyarakat seperti TKI ilegal. Sementara dalam hal *Personal Security* pemerintah sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU PPTKILN. Meskipun masih ada kekerasan yang terjadi Pemerintah tidak hanya diam, karena TKI ilegal memiliki hak asasi manusia sama seperti masyarakat ketika dirinya merasa terancam. Dalam hal ini peran Pemerintah Kaltara ataupun Pemerintah Sarawak, Malaysia masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa memberikan jaminan baik dalam segi ekonomi dan keamanan individu.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah di paparkan di atas. Cukup jelas bahwa kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait dengan Keamanan Manusia dalam Wilayah Perbatasan. Sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait ancaman terhadap *Human Security* yang berdampak lintas-batas (Transnasional) dan Dampak ancaman *Human Security* bagi keamanan Nasional, Regional dan Global. Selain itu, elemen lain selain *Economic Security* dan *Personal Security* juga dapat digunakan untuk memberikan hasil penelitian yang komprehensif dari Konsep *Human Security*. Sehingga dapat menjadi pembanding dalam melihat Keamanan Manusia dari sisi lain yang lebih komprehensif.